

# PERAN GEREJA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA: MENGINTEGRASIKAN GENERASI Z MELALUI PENDEKATAN POLITIK KEWARGAAN DAN POLITIK RADIKAL

Pascalin Dwi Aprilia

## **Abstract**

*The plurality and diversity found in Indonesia is a nation's wealth. However, the plurality and diversity of religions in Indonesia can also trigger outbreaks of conflict between religious communities. This research aims to show the importance of involving generation Z in the church's efforts to promote religious harmony in Indonesia. The method used in this research is qualitative. The author carries out a dialectic between the issue of religious harmony and the urgency to involve generation Z in it. The results of this research are that involving generation Z is not only a necessity but also an opportunity for the church to strengthen its presence and relevance in building a harmonious and inclusive society. Generation Z can be involved in joining interfaith activities so that through this involvement Z can feel that they have a responsibility, and contribute to maintaining religious harmony. Generation Z also needs to be given an understanding of civic politics and radical politics. Generation Z must first be aware of but be aware as citizens and know about Christian values to remain relevant to the people around them, and not withdraw from the public sphere, from community problems, and not avoid Christian ethics to people of different religions.*

**Keywords:** *Generation Z; Citizenship Politics; Radical Politics; Religious harmony; The role of the Church.*

## **Abstrak**

Kemajemukan dan keberagaman yang terdapat di Indonesia merupakan suatu kekayaan bangsa. Namun, kemajemukan dan keberagaman agama di Indonesia juga dapat menyulut letupan-letupan konflik antar umat beragama. Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan pentingnya melibatkan generasi Z dalam upaya gereja untuk mempromosikan kerukunan umat beragama di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Penulis melakukan dialektika antara persoalan kerukunan umat beragama dan urgensi untuk melibatkan generasi Z di dalamnya. Hasil dari penelitian ini yaitu melibatkan generasi Z bukan hanya menjadi keharusan tetapi juga menjadi peluang bagi gereja untuk memperkuat kehadiran dan relevansinya dalam membangun Masyarakat yang harmonis dan inklusif. Generasi Z dapat dilibatkan untuk bergabung dalam kegiatan lintas agama sehingga melalui keterlibatan ini generasi Z dapat merasakan bahwa mereka memiliki tanggung jawab dan kontribusi dalam

menjaga kerukunan umat beragama. Generasi Z juga perlu diberi pemahaman politik kewargaan dan politik radikal. Generasi Z harus terlebih dahulu menyadari perannya sebagai warga negara dan mengetahui tentang nilai-nilai kristiani namun tetap relevan bagi orang sekitar, dan tidak menarik diri dari ruang publik, dari persoalan masyarakat, dan tidak memaksakan etika kekristenan kepada orang yang berbeda agama.

**Kata kunci:** Kerukunan umat beragama; Peran Gereja; Generasi Z; Politik Radikal; Politik Kewargaan.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang majemuk. Salah satu bentuk kemajemukan Indonesia yaitu dengan adanya keragaman agama di Indonesia. Saat ini, terdapat enam agama yang diakui yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Selain keenam agama besar tersebut, di Indonesia juga terdapat agama dan kepercayaan lainnya yang umumnya merupakan agama dan kepercayaan dari suku-suku di Indonesia. Agama mempunyai jalinan dengan masyarakat yang sangat erat secara kesatuan dan satu sama lainnya saling mempengaruhi. Terkandung sumber nilai dan moral universal dalam agama yang dapat menjawab tantangan kehidupan dengan membentuk perilaku dan sikap manusia (Lestari, 2020: 30). Agama dapat bekerja dengan baik dan menjadi amat fungsional, selama perilaku sehari-hari seseorang membentuk pribadi yang baik maka ketika itu agama dijadikan sebagai cerminan oleh seseorang. Di kehidupan nyata agama bukan nilai yang terpisah, namun bersatu dalam perilaku manusia (Lestari, 2020: 30). Dengan demikian, terlihat bahwa agama sangatlah berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari setiap orang.

Pemerintah Indonesia menjamin kebebasan beragama di negara ini. Hal ini diperkuat dengan Pasal 28E ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi "Setiap warga negara bebas memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya." Zulkarnain, dalam Lestari, menegaskan bahwa Pancasila dan UUD 1945 merupakan jaminan bagi eksistensi agama dan kepercayaan di Indonesia. Hal ini berarti adanya masing-masing agama dan kepercayaan yang hidup di Indonesia mestilah dijamin oleh negara untuk menjalankan ajaran agama dan ajaran kepercayaan serta beribadat menurut agama dan kepercayaan yang diyakininya (Lestari, 2020: 30). Dengan demikian, seharusnya tidak ada satu agama dan kepercayaan yang lebih

diistimewakan daripada yang lain. Setiap agama sudah sepantasnya sama di depan hukum dan pemerintahan.

Kemajemukan dan keberagaman yang terdapat di Indonesia merupakan suatu kekayaan bangsa. Namun, kemajemukan dan keberagaman agama di Indonesia juga dapat menyulut letupan-letupan konflik antar umat beragama. Hal ini dikarenakan setiap agama memiliki klaim kebenarannya masing-masing. Fenomena keberagaman di Indonesia telah mengalami pasang surut sejak negara ini terbentuk. Terjadi berbagai peristiwa yang turut mewarnai perjalanan bangsa Indonesia dalam konteks hubungan antar pemeluk agama. M. Thoriqul Huda, *Center of Strategic Studies (CSIS)*, menyatakan bahwa pada tahun 2012 toleransi beragama orang Indonesia tergolong rendah, berdasarkan survei yang dilakukan pada februari 2012 di 23 provinsi dan 2.213 responden, disampaikan bahwa sebanyak 59,5% responden tidak berkeberatan bertentangan dengan orang yang beragama lain, sedangkan sekitar 33,7% menjawab sebaliknya (Huda, 2018: 930).

Berbagai kasus yang berkaitan dengan hubungan antar pemeluk agama yaitu, kasus pembakaran gereja di Temanggung, Jawa Tengah, dan penyerangan pada kelompok Ahmadiyah di Cikeusik, Banten (Latif, 2017: 1). Selain itu juga terdapat peristiwa bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya pada tahun 2018 bahkan agama juga tak jarang menjadi alat bagi politik untuk memperoleh kekuasaan. Salah satu konflik yang melibatkan agama sebagai alat bagi politik yaitu konflik Poso. Konflik Poso sebenarnya adalah konflik realistik yaitu, perebutan kekuasaan politik antar elit politik lokal di Poso yang kemudian massa dilibatkan dengan identitas agama dan etnis dengan tujuan untuk memobilisasi massa dalam memperoleh kekuasaan. Ketika konflik menyentuh ranah agama membuat pertikaian menjadi konflik non realistik bernuansa SARA dan menjadikan konflik terjadi berkepanjangan (Alganih, 2016: 173).

Berbagai peristiwa-peristiwa ini telah mengusik rasa kebangsaan sekaligus menodai sentiment kemanusiaan kita. Penyebab utama terjadinya konflik-konflik tersebut karena adanya sekelompok orang yang memaksakan kehendaknya dan tidak ingin ada perbedaan. Mereka lupa bahwa Indonesia di bangun atas landasan perbedaan-perbedaan, baik itu ras, golongan maupun agama. Idealnya, konflik-konflik tersebut tidak muncul dalam perjalanan sebagai bangsa yang menganut azas kebhinekaan (Latif, 2017: 7). Dengan demikian, kita dapat melihat kemajemukan dan keberagaman agama di Indonesia menjadi sebuah peluang dan tantangan.

Peluang untuk membangun negara ini sekaligus tantangan ketika setiap agama mengklaim akan kebenarannya masing-masing dan menyerang penganut agama lain. Konflik antar agama seperti adanya perbedaan dan kefanatisan beragama sehingga terdapat oknum-oknum masyarakat antara agama satu dengan lainnya saling menjatuhkan ataupun menghina yang kemudian menimbulkan perpecahan, perkelahian, dan penindasan antar agama satu dengan agama lainnya (Rachmadyastuti et al., 2022: 212).

Tantangan kerukunan umat beragama ini akan sangat sulit untuk diatasi, tetapi bukan berarti kita dapat berusaha untuk meminimalisir setiap ancaman yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama di Indonesia. Dalam meminimalisir ancaman-ancaman yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama di Indonesia maka bukan hanya peran pemerintah saja yang diperlukan, melainkan juga setiap orang yang ada di negeri ini termasuk di dalamnya organisasi dan komunitas agama. Gereja sebagai organisasi dan komunitas Kristen di Indonesia juga perlu terlibat dalam menghadapi berbagai tantangan kerukunan umat beragama. Gereja perlu terlibat karena sebagai sebuah organisasi dan komunitas Kristen, gereja memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk mempromosikan perdamaian, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama. Selain itu, gereja juga memiliki potensi sebagai tempat untuk menyediakan ruang dialog, pendidikan, dan pelayanan sosial yang dapat membantu membangun hubungan yang harmonis antar umat beragama. Melalui keterlibatan gereja, nilai-nilai seperti kasih, pengampunan dan persaudaraan dapat dijunjung tinggi, yang secara langsung berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih damai dan beradab. Untuk itu, gereja tidak hanya boleh bungkam ketika melihat berbagai ancaman-ancaman yang terjadi. Termasuk di dalamnya generasi Z sebagai kaum muda gereja yang tidak boleh pasif dalam melihat tantangan dan ancaman, dan harus terlibat aktif dalam memperjuangkan kerukunan umat beragama di Indonesia sehingga dapat terjadi kedamaian di negeri ini.

Generasi Z gereja perlu terlibat karena mereka adalah bagian penting dari jangkauan masa depan gereja dan juga komunitas Kristen secara keseluruhan. Generasi Z juga memiliki wawasan tentang tantangan dan perubahan sosial yang terjadi saat ini, termasuk tantangan kerukunan umat beragama. Keterlibatan mereka dapat membantu gereja memahami dan merespons secara efektif terhadap perubahan-perubahan tersebut. Generasi Z juga mempunyai bahasa dan media komunikasi mereka sendiri. Melibatkan mereka memungkinkan pesan

tentang kerukunan umat beragama disampaikan dalam bahasa dan format yang lebih mudah dipahami dan diterima oleh generasi muda. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh generasi Z gereja dalam mewujudkan kerukunan umat agama, salah satunya dengan menggunakan politik radikal dan politik transformatif. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk melihat peran gereja dalam melibatkan generasi Z melalui politik kewargaan dan politik radikal sebagai upaya menghadapi tantangan kerukunan umat beragama di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif guna memperoleh informasi yang mendalam. Tulisan ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan menganalisis berbagai jurnal dan buku mengenai masalah yang digumuli berupa peran gereja melibatkan generasi Z dalam menghadapi tantangan umat beragama di Indonesia. Teknik analisis yang penulis gunakan mengacu pada teori Miles dan Hubberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Anggito and Setiawan, 2018: 243). Penulis mengumpulkan data-data dari berbagai literatur berupa jurnal dan buku mengenai persoalan. Lalu mengorganisasi data yang telah didapatkan dan mendialogkannya dengan teori yang ada. Kemudian, penulis akan menyimpulkan hasil pembahasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Siapakah Generasi Z?***

Generasi Z adalah orang-orang yang lahir antara tahun 1995 hingga 2010 (Putri et al., 2024: 318). Hal ini berarti pada tahun 2024, generasi Z berusia 14-29 tahun. Generasi Z merupakan generasi yang ingin “*always on*” dalam dunia internet, baik itu teknologi maupun media sosial. Hal ini didukung dengan *handphone* sekarang yang dapat dimasukkan ke dalam saku mereka dan terhubung dengan sebagian besar populasi dan pengetahuan dunia (White, 2017: 38). Mereka disebut sebagai *digital natives* karena lahir dan dibesarkan di era digital. Bahkan mereka dapat menggunakan waktu 9 jam per hari untuk menjelajahi media sosial. Mereka dapat dengan mudah mengakses informasi melalui dunia media sosial. Akibat dari pengalaman resesi ekonomi dan politik, generasi Z mengembangkan

kepribadian dan keterampilan hidup mereka dalam lingkungan sosial ekonomi “ditandai dengan kekacauan, ketidakpastian, volatilitas, dan kompleksitas.” Mereka memiliki rasa kemandirian yang kuat dan jiwa wirausaha. Mereka memiliki keinginan yang kuat untuk membuat perbedaan (White, 2017: 39).

Generasi Z adalah yang paling beragam secara ras dari generasi mana pun hingga saat ini. Migrasi dan perkawinan campur mengakibatkan generasi Z sebagai multirasial. Mereka terhubung secara global, yang berarti lingkaran sosial mereka sering bersifat global. Akibatnya mereka memiliki sikap yang mengarah pada “menerima” perbedaan dan bersikap “inklusif.” (White, 2017: 44). Generasi Z juga menerima fluiditas seksual yang menolak label homoseksual atau heteroseksual. Bagi mereka, seksualitas harus dibebaskan dari setiap batasan, dan setiap orang harus diizinkan untuk mengikuti keinginan mereka, dari waktu ke waktu (White, 2017: 42). Namun, generasi Z cenderung mengalami adiksi (kecanduan) teknologi sehingga berdampak pada kurang sosialisasi, tidak fokus, dan kompetensi sosialnya sangat kurang (Kristyowanti, 2021: 25). Selain itu, generasi Z berkomunikasi melalui simbol, kecepatan, dan gambar, mereka juga memiliki kesadaran dan keprihatinan tentang kemanusiaan. Sebagian besar generasi Z masih percaya akan adanya Tuhan tetapi kurang dari setengahnya yang mengikuti kegiatan keagamaan mingguan dalam bentuk apapun, dan hanya sebagian kecil dari generasi Z yang menyebut pemimpin agama sebagai panutan (White, 2017: 43). Generasi Z menghargai cara orang beriman, tidak mempermasalahkan perbedaan keyakinan, cenderung menjadi pribadi yang humanis atau sosialis (Christiani, 2022: 71). Dari sini, kita dapat melihat bahwa generasi Z sosialis dengan menerima berbagai perbedaan tetapi mereka kurang bersosialisasi di dunia riil/nyata karena lebih banyak menggunakan media sosial.

Adhika Tri Subowo, dalam jurnalnya yang berjudul “*Membangun Spiritualitas Digital bagi Generasi Z*”, memperlihatkan penelitian yang dilakukan oleh Barna Group dan Bilangan Research Center pada tahun 2017. Penelitian pada 4.095 responden dengan rentang usia 15-25 tahun dari 42 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Hasilnya 91.8% remaja Kristen di Indonesia masih rutin untuk ikut ibadah di gereja, baik ibadah umum maupun pemuda atau remaja. Pada rentang usia 15-18 tahun jumlah remaja yang tidak rutin beribadah sebanyak 7,7%, meningkat menjadi 10,2% pada usia 19-22 tahun, dan mencapai 13,7% pada usia 23-25 (Subowo, 2021: 381). Hal ini memperlihatkan bahwa semakin generasi Z beranjak dewasa semakin meningkat pula jumlah mereka yang tidak mengikuti

ibadah rutin di gereja. Adapun alasan kaum muda meninggalkan gereja yaitu, 52,7% menjawab program gereja tidak menarik, 14,3% menjawab ada masalah kepemimpinan di gereja, sedangkan 5,6% menyebut gereja berisi kepura-puraan dan tidak otentik, adapun 16,2% menjawab tidak tahu (Subowo, 2021: 381).

Generasi Z sebagai kaum muda gereja yang mulai menghilang dari aktivitas gereja, mengancam nilai-nilai kekristenan tidak dihidupi lagi oleh generasi Z. Kurangnya pemahaman yang benar mengenai nilai-nilai kekristenan ini dapat membuat generasi Z Kristen memperlakukan agama lain sebagai yang berbeda dari mereka, atau mereka dapat menjadi acuh tak acuh dengan isu-isu yang dapat merusak keberagaman dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Mereka dapat menganggap bahwa isu tantangan dan ancaman yang dapat merusak kerukunan umat beragama di Indonesia sebagai di luar dari diri mereka karena mereka menganggap spiritualitas orang lain tidak berhubungan dengan mereka. Ini mengakibatkan mereka mengabaikan tantangan dan ancaman tersebut, dan memilih untuk tidak ikut campur. Untuk itu, gereja perlu untuk mempertahankan nilai-nilai kekristenan dalam generasi Z Kristen yang masih aktif di gereja sehingga generasi Z sebagai warga negara juga dapat terlibat memperjuangkan kerukunan umat beragama di Indonesia dengan mengacu pada nilai-nilai kekristenan. Gereja juga dapat melibatkan dan mempercayakan tanggung jawab kepada generasi Z.

### ***Politik Kewargaan***

Kewargaan adalah dasar dari semua politik. Ini merupakan prinsip pengorganisasian hubungan negara-masyarakat di negara-negara modern. Kewargaan menunjukkan hubungan antara warga negara dan pemerintah negara yang mengacu pada hak yang dinikmati warga negara serta kewajiban untuk berkontribusi pada kehidupan publik (Robert W. Hefner and Barbara Watson Andaya, 2018: 152).<sup>1</sup> Zainal Abidin Bagir dan AA GN Ari Dwipayana merasa pentingnya prinsip kewargaan yang setara, yang menganggap semua orang dan kelompok masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama terutama dalam masyarakat Indonesia yang plural (Bagir, 2011: 38).

---

<sup>1</sup> Politik kewargaan mengacu pada dua hal, yakni prinsip kewarganegaraan yang setara dan setiap warga negara perlu berpartisipasi aktif dalam dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan sosial secara beradab dan beradab.(Bagir, 2011: 61)

Kewargaan Republik berbicara kuat terhadap demokratisasi Indonesia. Gerry van Klinken dan Ward Berenschot menyebutkan perkembangan politik kewargaan di Indonesia dengan berbagai ketegangan. Terjadi bentrokan besar antara desentralisasi dan demokrasi selama revolusi ikonik anti-kolonial 1945-1949, masing-masing memperjuangkan demokrasi dan yang lain memperebutkan struktur negara. Kelahiran berdarah Orde Baru pada tahun 1965-1966 terjadi dorongan kontra-revolusioner untuk membangun negara otoriter modern dengan mendepolitisasi kewargaan sambil mempertahankan kapasitas negara pusat. Kewarganegaraan menandakan ketaatan dan kecenderungan untuk mengutamakan harmoni daripada protes. Terjadi penghormatan kepada pemegang otoritas negara sedangkan hak-hak warga negara hampir tidak ada begitupula dengan gagasan negara memiliki kewajiban (Hefner and Andaya, 2018: 151). Orde Baru memutilasi aspirasi kewargaan. Ketidakpuasan masyarakat yang semakin meningkat dengan “perundingan otoriter” yang terpusat inilah yang membuat argument untuk desentralisasi demokratis begitu menarik pada akhir tahun 1998. Pada era reformasi Indonesia mencerminkan transformasi yang lebih luas yang juga mempengaruhi negara, pasar, dan integrasi politik warga di seluruh dunia (Hefner dan Andaya, 2018: 151). Setelah 1998, di Indonesia muncul ide-ide baru tentang hak-hak kesejahteraan, protes terhadap politisi korup, dan, di provinsi-provinsi, komunitas politik alternative berdasarkan identitas agama atau lokal. Namun sayangnya, demokrasi belum sepenuhnya berhasil. Pemilihan umum yang bebas dan adil tampaknya tidak mengurangi dominasi elit oligarki (Hefner dan Andaya, 2018: 152). Sedangkan etnis, agama, seksual dan minoritas lainnya dibiarkan berjuang sendiri. Kewargaan di Indonesia saat ini menjadi lebih berbasis aturan bahkan lebih efektif jika demokratisasi tidak serta diikuti oleh desentralisasi (Hefner dan Andaya, 2018: 159).

Politik identitas seringkali menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai negara plural. Perlu adanya hubungan persahabatan lintas agama. Yahya Wijaya menemukan bahwa persahabatan lintas agama (iman) dapat menjadi dasar utama dalam berdialog dan membangun relasi antarumat beragama yang juga sekaligus membentuk identitas religius yang kontekstual (Ichwan, 2021: 131). Hubungan persahabatan lintas agama di Indonesia sudah terjadi secara natural di akar rumput. Persahabatan dapat menjadi dasar yang kuat untuk pembentukan identitas religius yang kontekstual (Ichwan, 2021: 131). Dengan adanya hubungan persahabatan lintas agama dan pengalaman bersama dengan

yang lain maka kita akan ikut menghargai dan menikmati kebaikan agama lain sebagai "*local wisdom*" yang tumbuh secara alami dari hubungan personal antar penganut agama yang berbeda (Ichwan, 2021: 134). Menurut Yahya Wijaya, dalam persahabatan, perbedaan-perbedaan bukan hanya didiskusikan tetapi dijadikan pengalaman bersama yang melenyapkan kekuatiran dan kebingungan karena berhadapan dengan konteks yang lain. Pengalaman persahabatan lintas agama bukan hanya bermanfaat bagi penempatan diri dalam masyarakat majemuk tetapi juga dalam mengatasi kecanggungan menyikapi perkembangan peradaban sebagai hasil perubahan sosial serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Ichwan, 2021: 142). Hubungan lintas agama sudah sering dijalin oleh kekristenan. Hubungan persahabatan ini telah memberikan pembaruan identitas bagi kekristenan yang mencakup peninjauan ulang bukan hanya konsep-konsep misiologi dan apologetik tetapi juga praktik-praktik pelayanan gerejawi termasuk ritus peribadatan dan layanan pastoral. Identitas yang baru perlu dilandaskan pada pengenalan pihak agama lain sebagai sahabat dalam hubungan personal yang saling berbagi, memberi dan menerima. Sang "liyan" bukan lagi kompetitor yang harus dikalahkan atau orang asing yang boleh diabaikan (Ichwan, 2021: 148). Persahabatan lintas agama seharusnya mendorong masing-masing mengenali diri sendiri dan mencapai tahap spiritual yang lebih mendalam dari agamanya sendiri (Ichwan, 2021: 149).

### ***Politik Radikal dalam Kekristenan***

Kata radikal berasal dari Bahasa Latin yaitu *radix* atau *radici* yang berarti "akar." Sebenarnya kata radikal bersifat netral.<sup>2</sup> Terjadi pergeseran makna kata radikal yang awalnya ialah kata yang netral bahkan cenderung positif tetapi ketika digunakan dalam situasi dan kondisi politik saat ini. Pihak-pihak yang berkepentingan menggiring pemahaman kata tersebut untuk mendukung keinginan atau tujuan dari penggunaan kata tersebut bagi penguasa. Peristiwa sejarah mencatat bahwa penggunaan istilah radikal pernah digunakan oleh penguasa penjajah Belanda untuk memberikal label negatif kepada para pemuda,

---

<sup>2</sup> Menurut *The Concise Oxford Dictionary* (1987), istilah radikal berarti 'akar,' 'sumber,' atau 'asal-mula.' Dimaknai lebih luas, istilah radikal mengacu pada hal-hal mendasar, prinsip-prinsip fundamental, pokok soal, dan esensial atas bermacam gejala, atau juga bisa bermakna "tidak biasanya" (*unconventional*) (2022) Sedangkan dalam KBBI, radikal berarti secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip), amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan); atau maju dalam berpikir atau bertindak (*no date*).

tokoh-tokoh pergerakan, dan kaum agama, seperti Dr. Soetomo, Sutan Sjahrir, M.H. Thamrin, dan Soekarno. Tokoh-tokoh tersebut menginginkan perubahan kebijakan penjajah yang menyengsarakan rakyat dari segi pendidikan, sosial, maupun ekonomi, dan yang menginginkan kemerdekaan. Penjajah Belanda memberikan label kepada gerakan-gerakan dan organisasi tersebut dengan istilah "ekstremis" atau "radikal." Dengan begitu, penjajah Belanda berharap agar masyarakat memandang bahwa gerakan dan organisasi tersebut memiliki tujuan negatif dan tidak didukung oleh masa sehingga tindakan kekerasan dan represif yang akan dilakukan oleh penjajah Belanda terhadap tokoh-tokoh tersebut dapat dibenarkan. Sebagai contoh yaitu Pangeran Diponegoro yang diberikan gelar radikal karena melawan kebijakan kolonial Belanda. Pangeran Diponegoro dengan tegas menolak Belanda yang membangun jalan yang membelah makan leluhurnya. Kata radikal diberikan kepada para tokoh yang menginginkan perubahan tersebut karena mereka tidak mau tunduk kepada penjajah, demi mempertahankan martabat dan kemerdekaan negeri ini. (Radikalisme....Part.II Historika, 2022). Selain arti negatif tersebut, radikal dalam pengertian netral bahkan cenderung positif, dapat dilihat dalam tulisan Mitsuo Nakamura. Nakamura menyebutkan bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang berwatak "tradisionalisme radikal." Istilah ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik NU sebagai organisasi otonom dan independent. Dalam peristiwa lain, istilah Radikal yang dianggap positif yaitu dalam bidang ekonomi dan industri. Sejarah mencatat bahwa Revolusi Industri dimulai pada akhir abad ke-18. Saat itu, terjadi peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris. Peralihan tersebut yaitu dari yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia, diganti dengan tenaga mesin yang berbasis manufaktur (Radikalisme....Part.II, Historika, 2022) Dari ulasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman kata atau istilah radikal tergantung pada siapa yang menggunakan dan kepada siapa ditujukan: (Radikalisme....Part.II, Historika, 2022)

1. Bila digunakan oleh kaum intelektual, kaum moderat, reformis, pengamat social, dan ilmu pengetahuan, istilah radikal berarti positif. Karena kata/istilah radikal menunjukkan perubahan dari suatu metode, pemahaman, atau system yang sebelumnya kurang efektif, kurang maju, dan kurang bisa memberikan kebaikan bagi orang banyak menjadi lebih baik, lebih ekonomis, dan lebih maju lagi.

2. Namun bagi penjajah atau kaum penguasa tiran, kata/istilah Radikal diarahkan bahkan dipaksakan untuk dipahami secara negatif. Mereka memaksakan kata/istilah Radikal sebagai pengganggu, pengacau, anti keamanan, perusuh, bahkan pemberontak kekuasaan.

Seperti yang telah disebutkan bahwa penganut paham radikal berarti mereka yang mengingini untuk kembali ke sesuatu yang asli atau akar yang sifatnya mendasar. Collins Dictionary of Sociology menyebutkan bahwa radikal ialah usaha untuk mengubah status quo. Kartodirdjo menyebutkan bahwa gerakan sosial radikal merupakan gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlaku dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang punya hak-hak istimewa dan yang berkuasa. Beberapa mereka yang radikal memang revolusioner meski tidak identik semuanya revolusioner (Nashir, 2018).

Kata radikal dalam agama sebenarnya memiliki sisi yang positif dimana setiap pengikut agama tetap mengakar pada ajaran-ajaran agamanya, baik itu eksplisit maupun implisit, terang-terangan menyebutkan dimensi sosial dan politik. Oleh karena itu, pada awalnya tidak ada yang salah dengan radikal. Karena ingin kembali ke asli atau akar. Sebagian kaum radikal menjadi "true believers" atau kelompok fanatik buta, dari sinilah benih radikalisme yang eksklusif, monolitik, dan intoleran (Nashir, 2018). Kelompok ekstremis hari ini tidak punya akar yang kuat baik historis dengan perpolitikan di Indonesia maupun akar pemikiran karena mereka tidak begitu banyak menampilkan dimensi-dimensi argumentatif di dalam memperjuangkan "politik radikal" tersebut, yang mereka perjuangkan adalah dimensi-dimensi ekstremis dan terorisme, terjadi pegeseran dari dimensi intelektual ke dimensi intoleran.

Selama ini dalam kalangan kekristenan, terdapat anggapan bahwa politik adalah sesuatu yang kotor di luar gereja sehingga perlu dijauhi. Sebenarnya, ketika kita menjadi warga dari sebuah negara dan hidup bersama dengan para warga negara yang lainnya, maka kita sudah dengan sendirinya terlibat dalam politik (Widjaja, 2014: 126). Namun, perlu diingat pula bahwa politik bukanlah sarana yang paling efektif untuk mengubah masyarakat. Meskipun negara mempunyai kuasa mutlak, dalam kenyataannya kekuasaan negara ini sangat terbatas. Negara, misalnya, tidak mempunyai kemampuan untuk mengatur dan meregulasi nilai-nilai hidup yang dianut oleh masyarakat (Widjaja, 2014: 128).

Keterlibatan orang-orang Kristen untuk mengupayakan perubahan masyarakat melalui pendekatan di jalur politik bukanlah satu-satunya strategi perubahan masyarakat, dan jelas bukan merupakan metode yang efektif. Perubahan pada masyarakat memang dapat dilakukan melalui pendekatan pada jalur politik atau ekonomi. Namun kedua pendekatan ini memiliki landasan yang rapuh sebab bergantung pada kekuatan eksternal. Jika ingin mengupayakan perubahan masyarakat yang benar-benar efektif, maka strategi yang harus lebih dikembangkan adalah pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat sipil. Ketika Yesus berkibrah di tengah masyarakat, Yesus mentransformasi masyarakat melalui pendekatan budaya dengan mengubah nilai-nilai hidup. Dalam corak aktivitas politis ini, Yesus tidak berusaha menciptakan struktur pemerintahan yang baru, atau menciptakan agama baru, melainkan menciptakan manusia baru (Widjaja, 2014: 136). Inilah pula yang harus diupayakan oleh orang-orang Kristen yang berkibrah di kutub politik. Bukan terutama untuk menyusun hukum ataupun menegakkan law enforcement, melainkan terutama untuk menciptakan ruang seluas-luasnya bagi kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk memainkan perannya dalam penyemaian nilai-nilai hidup dalam budaya yang dihidupi dan menghidupi Masyarakat (Widjaja, 2014: 131). Keterlibatan orang Kristen dalam aktivitas politik di ruang publik harus dilandaskan pada pengakuan iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu artinya, di mana pun juga kita berada dan berkarya, tujuan dari darma bakti kita adalah untuk memuliakan Kristus yang adalah Tuhan (Widjaja, 2014: 141).

Perjuangan Kristen secara politis bisa menggunakan saluran apapun yang tersedia tanpa harus menyakralkan partai dan simbol tertentu. Kelompok radikal adalah kelompok yang benar-benar ingin menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan politis. Bagaimana kita melakukannya? Perlu menekankan ketaatan dengan membicarakan relevansi agar kita tidak menarik diri dari ruang publik. Di lain sisi, jika kita terlalu menekan relevansi biasanya kita jadi kompromis. Mengalahkan nilai-nilai agama untuk bisa berkompromi dgn nilai-nilai lain. Kita bertindak kompromis dan menurunkan nilai-nilai standar Kristen, sehingga dampak yang ditimbulkan adalah kita menjadi kebingungan mana yang Kristen sejati mana yang tidak. Oleh karena ingin relevan dengan masyarakat sehingga kita mengkompromikan nilai-nilai agama. Lalu menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana supaya kita jangan terlalu bernafsu dan tetap taat pada nilai-nilai agama secara penuh ketika kita terlibat di ruang publik untuk menjadi relevan? Karena ketika

terlalu nafsu membawa nilai agama ke dalam ruang publik maka yang terjadi adalah hegemoni. Kita mentranspose etika agama menjadi etika publik.

Ketika etika agama dari agama yang spesifik kita transpose menjadi etika publik maka jadinya hegemoni, yaitu menindas kelompok lain yang punya etika berbeda. Ketegangannya selalu di sana, bagaimana kita taat tapi juga relevan tanpa menjadi hegemoni? Persoalannya bukan masalah apakah umat beragama perlu atau tidak terlibat dalam politik. Kita pasti akan terlibat dengan sendirinya. Persoalannya adalah kita mau terlibat dengan cara bagaimana, strateginya seperti apa? Gerakan yang dilakukan oleh Yesus menarik karena dapat menjadi inspirasi bagi "minoritas." Kita masih punya cara, Paulus Widjaja melihat bahwa jika tindakan kita dilandaskan pada kebaikan internal maka akan efektif sekali, itu akan membentuk karakter kita, tapi kalau dilandaskan pada faktor eksternal tidak akan membentuk karakter saya. Harus lahir dari hati nurani, tindakan yg membentuk karakter adalah yang lahir dari hati nurani. Menyemai nilai, kalau umat berubah maka berubah sesuai hati nurani, bukan karena ancaman akan hukuman melainkan keyakinan. Memang tidak mudah/tidak efisien untuk mentransformasi nilai seperti ini tetapi ini merupakan cara yang efektif. Begitupula dengan yang masuk dalam pilar politik harus mengingat bahwa yang perlu diperjuangkan adalah bagaimana kelompok sipil bisa diberdayakan, seperti mengembangkan pendidikan, dan mengembangkan kelompok-kelompok agama. Kita tetap dapat terlibat dengan apa yang ada di depan mata kita yaitu dengan menjadi bahkan mendidik orang-orang di sekitar kita untuk menjadi warga Indonesia yang baik, toleran, dan memperjuangkan keadilan tanpa memandang bulu. Dengan demikian, kita dapat menjalankan politik radikal yang tetap mengakar pada ajaran-ajaran agama, baik itu eksplisit maupun implisit. Menciptakan arus baru yang sesuai dengan nilai kekristenan kita, namun tetap relevan bagi orang sekitar kita, sehingga kita tidak menarik diri dari ruang publik, dari persoalan masyarakat, dan tidak menjadi hegemoni yang memaksakan etika kita pada orang lain.

### ***Gereja melibatkan Generasi Z melalui Politik Kewargaan dan Politik Radikal***

Generasi Z yang saat ini berusia 14 hingga 29 tahun menjadi generasi yang memiliki kondisi yang prima. Generasi Z sudah seharusnya menjadi generasi yang aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan dan aktivitas gerejawi. Bukan hanya dalam kegiatan-kegiatan internal gereja tetapi juga mewujudkan perannya sebagai warga

negara Indonesia, salah satunya dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan perkembangan globalisasi, generasi Z semakin menerima perbedaan yang ada, tetapi sayangnya mereka lebih banyak menghabiskan waktu mereka untuk melakukan penjelajahan di media sosial, sedangkan dalam dunia riil mereka cenderung kurang dalam bersosialisasi.

Di tengah maraknya isu ancaman-ancaman kerukunan umat beragama di Indonesia, Generasi Z haruslah memiliki kewaspadaan untuk dapat menjaga kerukunan umat beragama, terutama ketika agama digunakan menjadi alat bagi politik untuk memperoleh kekuasaan. Generasi Z perlu sadar akan perannya sebagai warga negara. Mereka merupakan bagian dari masyarakat sipil dari negara Indonesia sehingga mereka memiliki hak yang dapat dinikmati sebagai warga negara serta perlu untuk berkontribusi pada kehidupan publik. Ini menunjukkan bahwa generasi Z tidak boleh pasif. Mereka harus terlibat aktif dalam relasi dengan organisasi dan komunitas agama-agama lain sehingga dapat saling mengenal satu dengan yang lain.

Gereja harus melibatkan generasi Z karena mereka merupakan agen perubahan potensial dalam mempromosikan kerukunan umat beragama. Generasi Z memiliki pemahaman yang mendalam tentang tantangan sosial dan budaya yang dihadapi oleh generasi mereka, termasuk masalah kerukunan umata beragama. Melibatkan mereka memungkinkan gereja untuk merespons dengan lebih efektif tantangan-tantangan itu. Selain itu, melalui keterlibatan dalam upaya mempromosikan kerukunan umat beragama maka generasi Z dapat mengalami pembentukan nilai-nilai Kristen yang kuat dan memperkuat identitas mereka sebagai anggota gereja dan komunitas Kristen.

Gereja harus mengadopsi pendekatan yang inklusif dan proaktif untuk melibatkan generasi Z dalam upaya mempromosikan kerukunan umat beragama. Gereja dapat menciptakan ruang dialog yang terbuka dan inklusif agar generasi Z merasa didengar dan dihargai. Generasi Z juga perlu untuk diberi kesempatan dalam berperan aktif merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk mempromosikan kerukunan umat beragama. Di sisi lain, gereja juga perlu untuk mengembangkan materi pembelajaran dan pengajaran yang relevan dengan konteks generasi Z, termasuk isu-isu sosial, budaya, dan agama yang mereka hadapi. Hal ini memungkinkan mereka untuk

memahami dan merespons tantangan-tantangan kerukunan umat beragama dengan cara yang lebih efektif.

Gereja memiliki peran untuk melibatkan generasi Z dalam hubungan lintas agama agar dapat menjaga kerukunan umat beragama. Generasi Z haruslah membangun hubungan persahabatan lintas agama.<sup>3</sup> Pengalaman persahabatan lintas agama bukan hanya bermanfaat bagi penempatan diri dalam masyarakat majemuk tetapi juga dalam mengatasi kecanggungan menyikapi perkembangan peradaban sebagai hasil perubahan sosial serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Ichwan, 2021: 142). Dengan adanya persahabatan lintas agama maka seharusnya mendorong masing-masing mengenali diri sendiri dan mencapai tahap spiritual yang lebih mendalam dari agamanya sendiri (Ichwan, 2021: 149). Dengan demikian, generasi Z dapat senantiasa mawas diri terkait isu-isu yang mengancam kerukunan umat beragama di Indonesia. Adanya persahabatan lintas agama juga membuat generasi Z dapat mengenali agama lain lebih mendalam sehingga mengurangi kecurigaan maupun mengurangi sikap acuh tak acuh generasi Z terhadap sesuatu yang terjadi di sekitarnya.

Generasi Z juga dapat melakukan politik radikal, bukan dalam pengertian ekstrem, melainkan dengan kembali ke akar nilai-nilai kekristenan dan sesuai dengan konteks Indonesia. Seperti yang telah dicontohkan oleh Yesus. Ketika Yesus berkiprah di tengah masyarakat, Yesus mentransformasi masyarakat melalui pendekatan budaya dengan mengubah nilai-nilai hidup. Dalam corak aktivitas politis ini, Yesus tidak berusaha menciptakan struktur pemerintahan yang baru, atau menciptakan agama baru, melainkan menciptakan manusia baru (Widjaja, 2014: 136). Inilah pula yang harus diupayakan oleh orang-orang Kristen. Sebagai masyarakat sipil, generasi Z perlu untuk memainkan perannya dalam penyemaian nilai-nilai hidup dalam budaya yang dihidupi dan menghidupi Masyarakat (Widjaja, 2014: 131). Nilai-nilai kekristenan seperti kasih dan menjadi pembawa damai di tengah masyarakat yang majemuk ini haruslah dilakukan oleh generasi Z. Di sini juga gereja perlu untuk memerhatikan nilai-nilai kekristenan yang dipahami oleh generasi Z agar mereka tidak jatuh pada radikal ekstrem, dan dapat mengaktualisasikan nilai-nilai kekristenan, bukan hanya dalam hubungannya dengan lintas agama melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari mereka. Generasi Z di usia produktif mereka ini perlu untuk menunjukkan eksistensi diri

---

<sup>3</sup> Persahabatan dapat menjadi dasar yang kuat untuk pembentukan identitas religius yang kontekstual (Ichwan, 2021: 131).

mereka, bukan malah menarik diri dari lingkungan sekitar dan tidak memedulikan dengan aktivitas sosial di sekitar mereka. Generasi Z Kristen haruslah menciptakan arus baru yang sesuai dengan nilai kekristenan, namun tetap relevan bagi orang sekitarnya, sehingga generasi Z tidak menarik diri dari ruang publik, dari persoalan masyarakat, dan tidak menjadi hegemoni yang memaksakan etikanya pada orang lain.

Generasi Z dapat mencontoh peran pemuda di Desa Pantai Harapan Kecamatan Cempaga Hulu dalam meningkatkan kerukunan dan keharmonisan umat beragama dalam kehidupan masyarakat yakni menciptakan rasa aman saling menghormati dan menghargai antar umat beragama, tidak mencela agama satu sama yang lainnya sehingga tercipta keharmonisan antar umat (Isdayanti et al., 2020: 19). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa gereja juga perlu untuk melibatkan generasi Z untuk bergabung dalam kegiatan lintas agama sehingga melalui keterlibatan ini generasi Z dapat merasakan bahwa mereka memiliki tanggung jawab, dan kontribusi dalam menjaga kerukunan umat beragama. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Pemuda Lintas Agama (FORKUGAMA) Provinsi Jawa Timur yang melibatkan pemuda dari berbagai suku, ras dan agama, yang menggunakan grup media sosial untuk membahas berbagai isu terkini terkait persoalan masyarakat yang bersumber dan berkaitan dengan agama, selain dibagikan, informasi tersebut akan dibahas bersama di dalam grup sebelum ditindaklanjuti untuk dilakukan pertemuan-pertemuan lanjutan. Grup ini juga berguna untuk dapat mengklarifikasi berbagai *hoax* yang berkaitan dengan agama. Selain itu, dengan berkumpul di warung kopi untuk menjalin kordinasi dan komunikasi atau bahkan hanya sekedar tempat bercanda untuk menghilangkan stress. Dengan konsep yang santai pembicaraan berlangsung mengalir, tidak melulu fokus pada isu- isu keagamaan, namun juga berbagai isu lain yang sedang menjadi trending topik. Ada juga forum seminar pemuda lintas agama dalam rangka memperkuat peran pemuda dalam menjaga kerukunan (Huda, 2018: 935).

Gereja juga harus mau untuk membuka dirinya dalam bekerja sama dengan organisasi dan komunitas agama lainnya sehingga kerukunan umat beragama dapat benar-benar dicontohkan oleh gereja kepada generasi Z. Gereja memberikan pengajaran dan contoh kerukunan umat beragama yang sesuai dengan nilai kekristenan kita, namun tetap relevan bagi orang sekitar, sehingga

generasi Z dapat mencontohnya dan tidak menarik diri dari ruang publik, dari persoalan masyarakat, dan tidak memaksakan etika kekristenan kepada orang yang berbeda agama. Dengan demikian, generasi Z dapat menghadirkan Kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat majemuk ini melalui kasih dan kedamaian yang dihidirkannya.

## **KESIMPULAN**

Di dalam konteks tantangan kerukunan umat beragama di Indonesia, melibatkan generasi Z menjadi suatu keharusan bagi gereja sebagai sebuah lembaga yang berperan dalam mempromosikan perdamaian, toleransi, dan kerukunan. Generasi Z tidak hanya merupakan bagian integral dari jangkauan masa depan gereja melainkan juga agen perubahan yang potensial dalam membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif. Gereja dapat melibatkan generasi Z untuk bergabung dalam kegiatan lintas agama sehingga melalui keterlibatan ini generasi Z dapat merasakan bahwa mereka memiliki tanggung jawab, dan kontribusi dalam menjaga kerukunan umat beragama. Dengan melibatkan generasi Z dalam kegiatan lintas agama maka mereka dapat lebih mengenal agama-agama di luar dari agama Kristen, dan bahkan semakin mengenal dan memahami agama Kristen yang mereka anut selama ini. Generasi Z juga perlu diberi pemahaman politik kewargaan dan politik radikal. Generasi Z harus terlebih dahulu menyadari perannya sebagai warga negara dan mengetahui tentang nilai-nilai kristiani namun tetap relevan bagi orang sekitar, dan tidak menarik diri dari ruang publik, dari persoalan masyarakat, dan tidak memaksakan etika kekristenan kepada orang yang berbeda agama. Gereja juga harus mau untuk membuka dirinya dalam bekerja sama dengan organisasi dan komunitas agama lainnya sehingga kerukunan umat beragama dapat benar-benar dicontohkan oleh gereja kepada generasi Z. Dengan demikian, maka gereja juga ikut terlibat menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia, memberikan suatu peluang bagi gereja untuk terus relevan dan efektif dalam mempromosikan nilai-nilai kerukunan umat beragama di Indonesia, dan dapat menghadirkan Kerajaan Allah di dunia melalui kasih dan damai yang dibawanya ke dalam kerukunan umat beragama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alganih, I., 2016. Konflik Poso (Kajian Historis tahun 1998-2001). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 5, 166–174.
- Anggito, A., Setiawan, J., 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak, Sukabumi.
- Bagir, Z.A., 2011. *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*. Mizan, Bandung.
- Christiani, T.K., 2022. Pendidikan Kristiani Intergenerasional, in: Nugroho, W.S. (Ed.), *Pembangunan Jemaat Intergenerasional*. Taman Pustaka Kristen Indonesia, Yogyakarta.
- Huda, M.T., 2018. Potret Kerukunan Pemuda Lintas Agama di Jawa Timur. *PROCEEDINGS of Annual Conference for Muslim Scholars (AnCoMS) 2*, 929–936.
- Ichwan, M.N., 2021. *Agama, Kemanusiaan dan Keadaban: 65 Tahun Prof. Dr. KH. Muhammad Machasin, MA*. SUKA Press, Yogyakarta.
- Isdayanti, E., Lion, E., Saefulloh, A., 2020. Strategi Merawat Kerukunan Dalam Keberagaman Masyarakat di Desa Pantai Harapan Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)* 12, 16–21.
- KBBI, n.d. *Radikal*. <https://kbbi.web.id/radikal>
- Kristyowanti, Y., 2021. Generasi “Z” dan Strategi Melayaninya. *AMBASSADORS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 2, 22–34.
- Latif, M., 2017. *Model Kerukunan antar Umat Beragama (Studi kasus atas Masyarakat Dusun Borongbulo, Desa Paranglompoa, Kec. Bontolempagan, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia)*. Repository UIN Alauddin Makassar 1–30.
- Lestari, J., 2020. Pluralisme Agama di Indonesia: Tantangan dan Peluang bagi Keutuhan Bangsa. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* 1, 29–38.
- Nashir, H., 2018. *Paradoks Radikalisme*. Republika.co.id. <https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/09/23/pfhk0u440-paradoks-radikalisme>
- Putri, I.C., Zainab, M.S., Wulandari, W., 2024. Pengaruh Era Disrupsi Teknologi terhadap Pengetahuan Kebudayaan Generasi Z. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)* 1, 317–324. <https://doi.org/10.62017/jppi.v1i2.562>

- Rachmadyastuti, A., Nandani, S.A.S., Saputra, R., Al-Husna, Y.S., Rahma, F.N., 2022. Tantangan Multikulturalisme Di Indonesia Dalam Disintegrasi Umat Beragama. *MASALIQ: Jurnal Pendidikan dan Sains* 2, 209–220.
- RADIKALISME....PART.II *Historika*, 2022. . BDK Banjarmasin Kementerian Agama. <https://bdkbanjarmasin.kemenag.go.id/berita/radikalisme-part-ii-historika>
- Robert W. Hefner, Barbara Watson Andaya, 2018. *Routledge Handbooks of Contemporary Indonesia*. Routledge, London & New York.
- Subowo, A.T., 2021. Membangun Spiritualitas Digital bagi Generasi Z. *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 5, 379–395.
- White, J.E., 2017. *Meet Generation Z: Understanding and Reaching the New Post-Christian World*. Baker Books, Grand Rapids.
- Widjaja, P., 2014. Partisipasi Kristiani dalam Politik di Indonesia: Antara Mitos, Realita, dan Politik Yesus. *Gema Teologi* Vol. 38, 123–142.
- Yusmandi, 2022. *RADIKALISME ...Part.1( Basic meaning ) / Re-post*. BDK Banjarmasin Kementerian Agama. <https://bdkbanjarmasin.kemenag.go.id/berita/radikalisme-part-1-basic-meaning-re-post#:~:text=Secara%20etimologi%2C%20radikal%20berasal%20dari,bahasa%20Latin%2C%20radix%20atau%20radici>. (accessed 6.26.22).